

Implementasi UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pengrajin Batik Jember

Iffan Gallant El Muhammadiyah, Idris Mahmudi

iffangallant@unmuhjember.ac.id

Abstract

Batik is now more appreciated by the Indonesian people and using batik in formal activities. Can be seen from the level of education of children who received formal education Kindergarten, Elementary School, Secondary Secondary School, up to High School or in Vocational are all wearing batik. UU No 20 of 2008 is proof that the Government of Indonesia to do the power and efforts to making batik as world cultural heritage by building micro, small and medium enterprises. Jember District Government itself has conducted Guidance to the small industrial sector is also implemented at the level of local government level. The coaching has given birth to the production that deserves to be proud of. Noted there are 33 (thirty three) batik motif which is typical of Jember culture. Implementation of the program of empowerment of micro batik business in Jember Regency is in accordance with Law number 20 year 2008 but the substance in Law number 20 year 2008 has not been implemented in depth. Some programs are still experiencing many shortcomings that are actually listed in Law number 20 of 2008. Dinas Cooperatives and SMEs Jember Regency has not been able to run the program well in accordance with Law number 20 of 2008. The results of implementation of micro-business empowerment program of Regency Jember is considered not good because there are still many obstacles that can not be resolved by the Office of Cooperatives and SMEs Jember District such as marketing, funding and facilities or exhibition space that does not yet exist.

Keywords: *implementation process, supporting factors, inhibiting factors, implementation results, human resources and environmental conditions*

Abstrak

Batik kini lebih diapresiasi oleh Rakyat Indonesia dan menggunakan batik dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat formal. Dapat dilihat dari tingkatan pendidikan anak yang mengenyam pendidikan formal Tingkat Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Lanjut, hingga Sekolah Menengah Atas ataupun di Kejuruan semuanya memakai pakaian batik. UU No 20 Tahun 2008 merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia melakukan daya dan upaya untuk menjadikan batik sebagai warisan budaya dunia dengan membangun usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri telah melakukan Pembinaan terhadap sektor industri kecil dilaksanakan pula dalam tataran tingkat pemerintah daerah. Pembinaan tersebut telah melahirkan hasil produksi yang patut untuk dibanggakan. Tercatat ada 33(tiga puluh tiga) motif batik yang merupakan khas budaya Jember. Implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 namun substansi dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 belum secara mendalam diimplementasikan. Beberapa program masih mengalami banyak kekurangan yang sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Jember belum mampu menjalankan program dengan baik yang sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008. Hasil implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik Kabupaten Jember dianggap belum baik karena masih banyak kendala-kendala yang belum dapat diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember seperti pemasaran, pendanaan dan sarana atau tempat pameran yang belum ada.

Kata Kunci: *proses implementasi, faktor pendukung, faktor penghambat, hasil implementasi, sumber daya manusia dan kondisi lingkungan*

Pendahuluan

Pada Bulan Oktober 2009 UNESCO menetapkan Batik menjadi Warisan Kemanusiaan Budaya Lisan dan Non-Bendawi. Sebagai Warisan Kebudayaan Dunia, Batik kini lebih diapresiasi oleh Rakyat Indonesia dan menggunakan batik dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat formal. Dapat dilihat dari tingkatan pendidikan anak yang mengenyam pendidikan formal Tingkat Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Lanjut, hingga Sekolah Menengah Atas ataupun di Kejuruan semuanya memakai pakaian batik. Tidak hanya sektor publik, di sektor privat juga mendukung batik sebagai seragam utamanya.

Pemerintah Indonesia menetapkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Wulandari (2011. h.67)¹ menyampaikan bahwa tantangan besar yang dihadapi oleh industri batik adalah sumber daya manusia. Hal ini

semakin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah tentang perlunya pembinaan terhadap sektor industri kecil memperlihatkan kesungguhan pemerintah.

Pembinaan terhadap sektor industri kecil dilaksanakan pula dalam tataran tingkat pemerintah daerah. Dibuktikan di Kabupaten Jember, pembinaan tersebut telah melahirkan hasil produksi yang patut untuk dibanggakan. Sebagaimana disebutkan dalam <http://jembertourism.com/batikjember.html> tercatat ada 33(tiga puluh tiga) motif batik yang merupakan khas budaya Jember. Khas karena dalam batik jember motif yang muncul sebagai andalan pengrajin batik tersebut adalah motif daun tembakau. Kabupaten Jember yang memiliki lambang tembakau digunakan sebagai motif batik Jember. Selain motif tembakau juga diperkenalkan motif komoditas unggulan agribisnis lainnya yaitu motif kopi, coklat, dan motif buah naga.

Hasil produksi yang beragam tersebut bukan berarti indikator utama keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan industri kecil menengah. Perlu dilihat secara lebih mendalam sehingga tujuan pembangunan suatu negara dapat terwujud demi tercapainya tingkat kualitas hidup masyarakat. Diperlukan sarana berupa dukungan kebijakan yang komprehensif sebagai suatu kesatuan kegiatan pembangunan yang

¹Wulandari, A. (2011). Batik nusantara: makna filosofis, cara pembuatan dan industri batik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal.7

memerlukan “teknologi-teknologi” tertentu sebagaimana disampaikan menurut Slamet yang dalam Mardikanto dan Soebinto(2012, h.6)².

Berdasarkan asumsi diatas maka peneliti ingin melihat implementasi program usaha mikro batik di Kabupaten Jember dengan judul penelitian Implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pengrajin Batik Jember (Study di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jember, Industri Kecil Batik Rolla, dan Industri Kecil Batik Sumberjambe Kabupaten Jember).

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai mana berikut:

1. Bagaimanakah implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pengrajin batik Jember?
2. Apa saja faktor-faktor yang muncul sebagai faktor pendukung dan penghambat perkembangan implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pengrajin batik Jember?

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pengrajin batik Jember.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang muncul sebagai faktor pendukung dan penghambat

perkembangan implementasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pengrajin batik Jember

Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi penelitian ini akan menjadi khasanah ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan;
2. Bagi masyarakat penelitian ini mendorong berkembangnya semangat bagi masyarakat mengenai usaha mikro kecil dan menengah terutama bagi pengrajin batik Jember.

Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Menurut Udoji dalam Agustino (2008:140)³ mengatakan bahwa: pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

² Mardikanto, Totok.dan Soebianto, Poerwoko. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta hal.6

³Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta. Hal 140

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149)⁴ mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan Grindle dalam Agustino (2008:139)⁵ bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Model Implementasi Kebijakan

Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau pembelajar tingkat awal. Menurut Nugroho (2008:167)⁶ pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (*top-bottom*) dan dari bawah ke atas (*bottom-top*), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang

berpola paksa (*command-and-control*) dan pola pasar (*economic incentive*).

Agustino (2008:140)⁷ pendekatan model “*top down*”, merupakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya, sedangkan pendekatan model “*bottom up*” bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Model yang digunakan oleh peneliti yaitu:

Model Implementasi Kebijakan George C.Edward III

Menurut George C.Edward III, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka model implementasi kebijakan publik yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C.Edward III. Pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel dalam model yang dibangun oleh Edward III tersebut

⁴Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center for Academic Publishing Service. Hal.149

⁵*Op.Cit.* hal 139

⁶Nugroho, R. (2008). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal 167

⁷*Op.Cit.* hal.140

memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Kempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Sementara itu, model yang dikemukakan Edwards III dalam Agustino (2012:149)⁸ implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi,

sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain makahal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

B. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Edward III dalam Agustino (2012:152)⁹ menyatakan bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu:

⁸Ibid hal 149

⁹Ibid Hal 152

1. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
2. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
4. Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

C. Disposisi atau *attitudes*

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau program, sedangkan apabila implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi atau pelaksanaan program juga menjadi tidak efektif.

D. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Nugroho (2011:636)¹⁰, menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan/atau pemerintah.

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:153)¹¹, dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Procedure* (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan /administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

¹⁰*Op.Cit* Hal 636

¹¹*Op.Cit* Hal 153

Berdasarkan penjelasan berbagai ahli mengenai model implementasi, peneliti menggunakan model implementasi dari Edward III, karena Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 mempunyai karakteristik *top down* yang sesuai dengan tipe Edward III. Variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh Edward III merupakan variabel yang bisa menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat lebih konkret dalam menjelaskan proses implementasi yang sebenarnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D.L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999;398)¹² dalam Pasolong (2010;59)¹³. Menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu *assembling* produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki

kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Gow dan Morss dalam Pasolong (2010;59) mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain: (1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan; (2) kelemahan institusi; (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif; (4) kekurangan dalam bantuan teknis; (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu (*timing*); (7) sistem informasi yang kurang mendukung; (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor; dan (9) dukungan yang berkesinambungan.

Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal). Dalam Pasolong (2010;59), hambatan dari dalam atau yang sering disebut dengan faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Sedangkan hambatan dari luar atau sering disebut sebagai faktor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi social budaya dan sebagainya.

Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2006). Efficiency and cost-benefit analysis. *Handbook of public policy*, hal 398.

¹³Pasolong, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. hal 59

Metodologi

Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian interpretivisme atau pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai realitas dan proses sosial yang akan diteliti. Serta tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya bagian dari suatu keseluruhan.

Studi kebijakan publik pada umumnya dimaksudkan untuk menggali tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi mengapa tindakan itu dilakukan, dengan cara dan mekanisme apa dilakukan, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasil, serta dampaknya. Metode penelitian kebijakan diharapkan dapat menemukan jalan keluar yang efektif dari masalah yang ada. Dengan kata lain, metode penelitian harus memiliki relevansi terhadap masalah yang dihadapi. Implementasi kebijakan merupakan salah satu masalah kebijakan publik yang cukup penting, sehingga membutuhkan analisis yang tepat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus mampu menangkap fenomena yang ada dan tidak hanya sebatas angka-angka.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian yaitu implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup batik di Kabupaten Jember.

Fokus dan Lokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi studi penelitian. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pengrajin Batik Jember. Fokus penelitian ini adalah implementasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan usaha kecil pengrajin batik Jember di Kabupaten Jember. Sedangkan lokus penelitian dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jember, Industri Kecil Batik Rolla, dan Industri Kecil Batik Sumberjambe Kabupaten Jember.

Proses Pengumpulan Data

Teknik pemilihan informan yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah purposive sample, artinya pengambilan dengan sengaja di dalam wilayah pengrajin batik untuk memperoleh key informan yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau yang terpercaya sedangkan untuk memperoleh data kualitatif, tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan teknik snowballing dimana pertama peneliti menentukan satu orang untuk dijadikan informan, kemudian selanjutnya orang tersebut yang akan menunjuk orang lain untuk

kita jadikan informan, baik di dalam lingkup pengrajin batik maupun diluar lingkup pengrajin batik. Begitu seterusnya, sampai data atau informasi yang diperoleh dirasa sudah cukup oleh peneliti. Setelah itu dilakukan triangulasi dimana data dan sumber data yang telah ada dikumpulkan sekaligus diuji kredibilitas datanya. Subyek penelitian yang dimaksud peneliti disini adalah pengrajin batik dan Dinas Koperasi dan UMK sebagai kepanjangan wewenang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul dilakukan analisis data sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Artinya selama dalam proses penelitian dilakukan analisis data dengan Model Miles and Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014: h.334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data sampai kepada penarikan kesimpulan yaitu data reduction, data display dan *conclusion drawing verification*.

Hasil

Penelitian Implementasi Pemberdayaan Batik di Kabupaten Jember ini menemukan UMKM pengrajin sekaligus pedagang batik di Kabupaten Jember sebagai berikut:

NO	Usaha
1	RUMAH BATIK ROLLA
2	UD. BINTANG TIMUR
3	UD. PURNAMA
4	UD. Pakemsari
5	UD. BATIK KALIWINING

Sumber: data diolah 2017

Hasil penelitian Pemberdayaan Batik di Kabupaten Jember ini didapati 2 (hasil) yaitu baik dan belum baik. Adapun penilaian baik pada proses implementasi program pemberdayaan batik di Kabupaten Jember, memiliki pertimbangan bahwa UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM telah dilaksanakan dengan baik terkait program pemberdayaan UMKM. Hal ini dapat dilihat pada pasal 7 UU No 20 tahun 2008 yang memiliki 8 (delapan) aspek penting dalam pemberdayaan yaitu:

1. Pendanaan.
2. Sarana dan prasarana.
3. Informasi usaha.
4. Kemitraan.
5. Perizinan usaha.
6. Kesempatan berusaha.
7. Promosi dagang.
8. Dukungan kelembagaan.

Berkaitan dengan pendanaan. Walaupun DPRD dan Bupati masih menggodok APBD 2017 serta adanya besaran SILPA 2016 namun bisa dijelaskan bahwa pendanaan program pemberdayaan UMKM sudah memiliki ketetapan hukum. Promosi Dagang yang dilakukan Dinkop dan UMKM, pengrajin batik sering diajak untuk melakukan promosi berupa menggelar pameran di berbagai event. Baik itu di dalam negeri atau di luar negeri. Dalam perizinan usaha sehingga mendapatkan kesempatan berusaha dianggap baik pula karena Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memfasilitasi UMKM untuk mengurus perizinan usaha.

Hasil implementasi pemberdayaan UMKM batik di Kabupaten Jember belum baik, memiliki pertimbangan seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember belum dapat menjalin kerjasama kelembagaan dengan instansi-instansi tertentu untuk membantu permasalahan pendanaan. Selama ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember masih mengandalkan dana dari APBD, padahal setiap tahunnya dana APBD belum mencukupi untuk memenuhi program pemberdayaan UMKM batik.

Informasi yang disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember dianggap masih belum menyentuh semua pengrajin di Sumberjambe. Jauhnya letak desa sumberjambe bisa dikatakan menjadi halangan utama dalam menyampaikan informasi dalam bentuk pembinaan. Terlebih dalam hal pemasaran, para pengrajin tidak diberikan bekal khusus untuk memasarkan hasil mereka via internet. Walaupun kini sudah ada yang mengulas tentang produksi batik mereka, namun yang memiliki *hosting web* atas nama mereka sendiri tidak ada. Bisa jadi dukungan dalam teknologi informasi sangatlah minim. Sehingga pemasaran mereka lakukan dengan cara konvensional.

Keterbatasan sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember mengakibatkan tidak adanya sistem kontrol yang rutin setelah dilakukan program pemberdayaan. Alhasil tidak adanya data statistik perkembangan UMKM batik setelah mengikuti program pemberdayaan pada setiap tahunnya. Selain itu UMKM batik lebih memilih untuk membeli bahan baku dari luar Kabupaten Jember. Kemudian masih terdapat beberapa

pengrajin batik yang belum pernah mendapatkan program pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Terlebih lagi masalah pemasaran dimana keterbatasan sarana dan prasarana berupa pertokoan untuk memasarkan batik hasil perajin.

Analisis

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup pengrajin batik Kabupaten Jember dilihat dari dua fenomena, yaitu proses dan hasil. Proses dan hasil dari implementasi program usaha mikro batik dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor-faktor Pendukung Implementasi Program Pemberdayaan usaha mikro Pengrajin Batik Kabupaten Jember yang dilihat dari sumber daya manusia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember kontribusi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember dalam melaksanakan program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember tidak memungut biaya sama sekali. Kemudian kesiapan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember sudah baik dapat dilihat dengan adanya rutinitas program yang dijalankan yang berdampak pada komitmen Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember dalam menjalankan program pemberdayaan melebihi jam kantor sebagai Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, faktor pendukung implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro batik lainnya adalah kompetensi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember sudah baik karena Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember selalu mengadakan kerjasama untuk mendatangkan

pengisi materi yang profesional dalam program pemberdayaan UMKM batik.

Untuk faktor-faktor Pendukung Implementasi Program Pemberdayaan UMKM Batik Kabupaten Jember yang dilihat dari kondisi lingkungan, yaitu *pertama* tidak ada permasalahan dalam hubungan sosial antara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. *Kedua* dalam pelaksanaan pelatihan, para pengrajin sangat antusias untuk berpartisipasi lebih sehingga mendapatkan hasil yang baik

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Kabupaten Jember yang dilihat dari sumber daya manusia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember, yaitu pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember masih sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Faktor yang lain adalah para pengrajin didominasi oleh orang-orang tua sehingga mengalami sedikit kendala dalam menerima program dan orang tua sering membawa anaknya ketika sedang mengikuti pelatihan sehingga kurang fokus.

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Kabupaten Jember yang dilihat dari kondisi lingkungan, yaitu *pertama* masih terdapat beberapa pengrajin batik yang belum pernah mendapatkan program pemberdayaan padahal selain Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember seperti Disperindag dan Disnaker pun melaksanakan program pemberdayaan UMKM. *Kedua* kendala sumber daya masih belum terselesaikan seperti ketersediaan bahan baku dengan harga murah, informasi pelatihan yang

belum tersampaikan kepada seluruh anggota pengrajin batik.

Simpulan

Implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 namun substansi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 belum secara mendalam diimplementasikan. Beberapa program masih mengalami banyak kekurangan yang sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember belum mampu menjalankan program dengan baik yang sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008. Hasil implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik Kabupaten Jember dianggap belum baik karena masih banyak kendala-kendala yang belum dapat diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember seperti pemasaran, pendanaan dan sarana atau tempat pameran yang belum ada.

Saran

Saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti antara lain:

1. Melaksanakan *Training of Trainers (TOT)*

Sumberdaya manusia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember yang terbatas dapat diatasi dengan mengadakan *Training of Trainers (TOT)* untuk mendidik seseorang untuk menjadi tenaga terampil yang khusus mendampingi UMKM batik untuk berkembang. Tenaga terampil akan fokus pada pemberdayaan UMKM batik karena tidak terikat dengan pekerjaan-pekerjaan kantor.

Dengan demikian Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember akan mudah dalam pengawasa terhadap UMKM batik. Tenaga terampil akan bertugas layaknya seorang guru yang mendidik dan mengarahkan muridnya (UMKM batik).

2. Menjalin Kerjasama

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember harus menjalin kerja sama yang baik dengan pengusaha-pengusaha besar untuk mendapatkan bantuan dana. Selain pengusaha besar bisa menjadi investor, pengusaha besar juga dapat memperluas pemasaran karena pengusaha besar telah menggunakan sistem bisnis jaringan sehingga sangat kuat dalam aspek pemasaran dan telah memiliki pasar yang luas.

3. Pemasaran batik yang modern

Sebagian besar pengrajin memiliki masalah yang sama yaitu pemasaran. Perlu upaya yang kuat berupa sentuhan Informasi Teknologi untuk mempermudah pemasaran sehingga tidak ada kain batik yang menganggur terlalu lama di etalase toko.

Daftar Pustaka

- Wulandari, A. (2011). *Batik Nusantara: makna filosofis, cara pembuatan dan industri batik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardikanto, Totok.dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabet